

Proteksionisme Di Era Liberalisasi Perdagangan: Studi Kasus Kebijakan Huawei Ban Oleh Amerika Serikat

Yohannes Panca Mukti

Hubungan Internasional, Universitas Mataram
email: johnsirlecture@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to determine the impact of trade liberalization on the United States, leading to the formulation of protectionist policies and examining the reasons behind the issuance of the Huawei Ban Policy. Researcher utilize the concepts of national interests and rational choice theory as frameworks for analysis. The study employs an explanatory research approach with a qualitative methodology, gathering data through literature reviews from various sources, including books, journals, and the internet. The research findings reveal that liberalization affect the United States's economy and security, prompting the implementation of protectionist policies. The formulation of the Huawei Ban Policy aligns with the United States' national interests, safeguarding national security against threats posed by Huawei's technology and protecting domestic economic industries. By applying rational choice theory and considering the costs and benefits in the research analysis, it becomes evident that the benefits accrued by the United States outweigh the associated costs. Consequently, the decision to implement the Huawei Ban Policy can be regarded as a rational choice made by the United States.

Keywords: Trade Liberalization, Protectionism, Huawei Ban, United States, National Interest, Rational Choice Theory, Cost and Benefit.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari liberalisasi perdagangan terhadap Amerika Serikat sehingga Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan proteksionisme dan alasan Amerika Serikat mengeluarkan Kebijakan Huawei Ban. Konsep kepentingan nasional dan teori pilihan rasional digunakan peneliti sebagai kerangka berpikir dalam penelitian. Peneliti menggunakan jenis penelitian eksplanatif dengan pendekatan kualitatif, melalui teknik pengumpulan data studi literatur yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan internet. Hasil Penelitian mendapati bahwa liberalisasi berdampak bagi perekonomian dan keamanan Amerika Serikat yang akhirnya membuat kebijakan proteksionisme. Pembuatan Kebijakan Huawei Ban adalah masuk ke dalam kepentingan nasional Amerika Serikat untuk menjaga keamanan negara dari ancaman teknologi milik Huawei dan melindungi industri perekonomian domestik. Melalui penerapan teori pilihan rasional menggunakan konsep cost and benefit dalam penelitian, benefit yang didapatkan oleh Amerika Serikat lebih besar dari cost yang harus dibayarkan, sehingga Kebijakan Huawei Ban oleh Amerika Serikat merupakan suatu pembuatan keputusan yang rasional.

Kata Kunci : Liberalisasi Perdagangan, Proteksionisme, Huawei Ban, Amerika Serikat, Kepentingan Nasional, Teori Pilihan Rasional, Cost and Benefit.

I. PENDAHULUAN

Liberalisasi perdagangan adalah penghapusan atau pengurangan pembatasan atau hambatan pada pertukaran barang bebas antar negara, seperti pemberlakuan tarif, (bea masuk dan biaya tambahan) dan hambatan nontarif (seperti aturan perizinan dan kuota) (BANTON, 2021). Pengurangan atau penghapusan pembatasan dapat menjadi langkah untuk mempromosikan perdagangan bebas. Liberalisasi perdagangan sendiri menjadi

konsep yang cukup kontroversial di dunia internasional. Kritik terhadap liberalisasi perdagangan mengklaim bahwa kebijakan itu dapat merugikan pekerjaan karena barang yang lebih murah akan membanjiri pasar domestik negara tersebut (Greenaway et al., 2007). Barang-barang tersebut berpotensi memiliki kualitas yang lebih rendah dan kurang aman dibandingkan dengan produk dalam negeri yang bersaing yang mungkin telah menjalani pemeriksaan keamanan dan kualitas yang lebih ketat. Namun, para

pendukung liberalisasi perdagangan mengklaim bahwa hal itu pada akhirnya menurunkan biaya konsumen, meningkatkan efisiensi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi (T. N. Srinivasan and Jagdish Bhagwati, 2001).

Liberalisasi perdagangan pun turut mendukung perkembangan investasi. Investasi adalah aset yang diperoleh atau uang yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan di masa depan (Cleartax, 2023). Investasi juga dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari apresiasi nilai aset di masa mendatang. Investasi adalah pembelian barang yang berorientasi pada masa depan, bertujuan untuk mendapatkan penghasilan atau kekayaan di masa depan. Pelaku investasi dapat memperoleh keuntungan dengan menjual aset di masa depan dengan harga yang lebih tinggi dari harga pembelian.

Terdapat peningkatan yang signifikan terhadap investasi asing di seluruh dunia pada akhir tahun 1980-an. Namun, beberapa negara yang menerima investasi asing menetapkan pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan investasi tersebut dengan fungsi sebagai pelindung dan pendorong industri dalam negeri dan mencegah keluarnya cadangan devisa negara (OECD, 2020). Cakupan dari pembatasan-pembatasan investasi yang ada antara lain; persyaratan kandungan lokal (yang mensyaratkan pembelian atau penggunaan produk atau barang produksi lokal), persyaratan neraca manufaktur (di mana komponen tertentu disyaratkan untuk diproduksi di dalam negeri), persyaratan neraca perdagangan, persyaratan penjualan domestik, persyaratan transfer teknologi, persyaratan kinerja ekspor (yang mensyaratkan jumlah atau presentase tertentu dalam volume produksi yang boleh diekspor), pembatasan ekuitas lokal, pembatasan devisa, pembatasan pengiriman uang, persyaratan perizinan, dan pembatasan pekerjaan (Haryo; Aswicahyono and others, 2022). Mengutip GATT Pasal III “*this standard provides for inland parity that is say equality for treatment between nation and foreigners*” yang berarti diskriminasi dalam

produk sejenis antar produk dalam negeri dengan produk luar negeri tidak diizinkan. Sood, 2018. Bila tindakan investasi menimbulkan distorsi atau penyimpangan perdagangan yang melanggar Pasal III GATT 1947, dan karena itu dibuatlah pelarangan (*Sidang Komite TRIMs WTO*, 2019).

Pertemuan akhir dalam Uruguay Round GATT membahas mengenai suatu perjanjian mengenai kekayaan intelektual yang nantinya akan dikelola oleh WTO. Perjanjian TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) merupakan perjanjian internasional yang mengatur hak kekayaan intelektual yang berlaku mulai dari tahun 1995 (WTO, 1995). Perjanjian ini menerapkan prinsip-prinsip dasar perdagangan seperti perlakuan nasional dan perlakuan terhadap negara yang paling difavoritkan (*most-favored-nation treatment*) terhadap masalah kekayaan intelektual (USPTO, 2017). Tujuannya adalah untuk mempromosikan perdagangan pengetahuan dan kreativitas, menyelesaikan perselisihan perdagangan terkait kekayaan intelektual, dan memungkinkan negara-negara anggota untuk mencapai tujuan kebijakan dalam negeri mereka.

Melalui Uruguay Round juga dihasilkan suatu kesepakatan mengenai investasi, yaitu *Trade-Related Investment Measures* (TRIMs) (WTO, 2022). Beberapa perjanjian internasional yang mendisiplinkan tindakan yang membatasi investasi hanya memberikan panduan terbatas terkait konten dan cakupan negara. Kode OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) menjadi salah satu contoh yang dapat diperhatikan, di mana kode ini mewajibkan negara anggotanya untuk meliberalisasi pembatasan investasi langsung di berbagai bidang (OECD, 2008). Namun, dengan banyaknya reservasi yang dibuat masing-masing anggota, membuat Kode OECD kurang efektif. Terdapat perjanjian internasional lainnya, baik bilateral maupun multilateral, di mana penandatanganan memperluas perlakuan negara yang paling disukai untuk melakukan investasi, walaupun hanya sebagian perjanjian yang

mendapatkan perlakuan nasional untuk investasi langsung. Selain itu, meskipun pada bulan November 1994 telah diadopsi aturan terkait investasi secara keseluruhan, termasuk di dalamnya non-diskriminasi dan perlakuan nasional, yaitu Prinsip-Prinsip APEC, prinsip-prinsip tersebut tidaklah memiliki kekuatan yang mengikat (Bayhaqi & Mann, 2019).

Trade-Related Investment Measures (TRIMs) adalah perjanjian yang dibuat oleh WTO untuk mempermudah investasi global dengan menghilangkan hambatan-hambatan yang menghalangi investasi asing (Kementerian Luar Negeri RI, 2014). TRIMs adalah perjanjian tentang aturan investasi yang berkaitan dengan perdagangan. Perjanjian TRIMs dimaksudkan untuk mengurangi atau menghapus kegiatan perdagangan dan meningkatkan kebebasan kegiatan investasi antar negara. TRIMs bertujuan untuk menyatukan kebijakan negara-negara anggota yang berkaitan dengan investasi asing dan mempertahankan perlindungan perdagangan berdasarkan prinsip-prinsip *the General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) (*Sidang Komite TRIMs WTO*, 2019). Namun, kebijakan proteksionis yang diterapkan oleh AS, seperti Huawei Ban, bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan perlakuan nasional yang diatur dalam TRIMs. Kebijakan tersebut membatasi investasi asing di AS dan mempengaruhi hubungan internasional di dalam situasi liberalisasi perdagangan.

Kemudian, di era liberalisasi perdagangan ini, suatu negara tidak ingin kalah saing dengan perusahaan-perusahaan lain dari berbagai belahan dunia yang ada di negaranya. Terdapat berbagai cara untuk dapat bersaing, seperti meningkatkan kualitas produksi, memaksimalkan tingkat produksi, sampai cara melindungi industri domestik dengan proteksionisme. Banyak ahli yang berpendapat bahwa tidak masalah keuntungan yang didapatkan oleh suatu negara tidak sebanding dengan negara lainnya di mana mereka melakukan kerja sama atau hal tersebut sering disebut sebagai “keunggulan komparatif”

(MCDONALD, 2012). Hal tersebut nyatanya kerap disalahartikan oleh sebagian negara dengan *power* besar, seperti Amerika Serikat yang kerap kedapatan melanggar perjanjian-perjanjian perdagangan yang aturannya telah ada dalam *World Trade Organization*.

Power besar yang disalahgunakan Amerika Serikat salah satunya ketika dikeluarkannya kebijakan tarif atas barang-barang Tiongkok pada tahun 2018 masa pemerintahan Presiden Donald Trump. Lebih dari \$550 miliar telah dipungut Amerika Serikat dari ekspor produk Tiongkok. WTO (sebagai organisasi yang mengatur perdagangan global) mengatakan hal tersebut sebagai pelanggaran internasional dan melaporkan hal tersebut dengan panel yang berisi “... that the United States had not met its burden of demonstrating that the measures are provisionally justified” (Bloomberg, 2020).

Walaupun banyak aktor yang menggalangkan perdagangan bebas, tidak jarang didapati suatu negara mencoba melindungi perekonomian negara mereka dengan regulasi atau hal-hal yang berkaitan dengan proteksionisme. Proteksionisme adalah sebagai paham perlindungan yang dilakukan pemerintah terhadap dunia usaha (Investopedia, 2022). Proteksionisme juga dapat didefinisikan sebagai kebijakan oleh pemerintah yang dilakukan secara sengaja untuk mengendalikan impor atau ekspor, menggunakan cara dengan menangani hambatan perdagangan, seperti tarif kuota, bertujuan tentu saja melindungi industri dalam negeri dari industri luar negeri (Sumadji, 2006).

Seringkali fokus dari kebijakan proteksionisme persoalan impor, tetapi aspek-aspek lain dari perdagangan internasional juga dapat terlibat di dalamnya, seperti standar produk dan subsidi pemerintah (Investopedia, 2022). Kelebihan proteksionisme adalah subyek perdebatan sengit. Para kritikus berpendapat bahwa dalam jangka panjang, proteksionisme merugikan pihak lain dan entitas yang dimaksudkan untuk dilindungi dengan memperlambat pertumbuhan ekonomi dan

meningkatkan inflasi harga, menjadikan perdagangan bebas sebagai alternatif yang lebih baik (Cappariello, Gunnella, dan Franco-bedoya, 2009).

Paham proteksionis / proteksionisme dapat dikatakan sebagai kebalikan dari liberalisasi perdagangan yang dicirikan dengan hambatan ketat dan regulasi pasar. Hasil liberalisasi perdagangan dan integrasi yang dihasilkan antar negara dikenal sebagai globalisasi. Para pendukung proteksionisme berpendapat bahwa kebijakan tersebut dapat membantu menciptakan pekerjaan rumah tangga, meningkatkan produksi produk domestik bruto, dan membuat ekonomi domestik lebih kompetitif secara global (International Monetary Fund, 1978). Banyak sekali pendapat yang mengatakan bahwa perdagangan bebas dan deregulasi mewakili tatanan alamiah di berbagai bidang. Namun, melalui sejarah kita dapat melihat Amerika Serikat sebagai negara dengan kekuatan proteksionis bagi sebagian besar keberadaannya, dan tarif merupakan kunci keberhasilannya sebagai kekuatan ekonomi dunia pada awal abad 20 mengalahkan Inggris (Alfred E. Eckes, 1995).

Proteksionisme merupakan keputusan rasional bagi negara seperti Amerika Serikat. Sebagai suatu negara, mereka tentu saja akan dan telah melakukan segala cara untuk keamanan dan pertahanan negara mereka. Dalam perdagangan internasional, Amerika Serikat lebih terlihat berusaha untuk menjaga keamanan mereka dan tidak ingin membiarkan negara lain mengalahkan mereka. Dalam hal ini, Amerika Serikat memandang Inggris sebagai rival. Selain Amerika Serikat, sebenarnya terdapat beberapa negara pada akhir abad ke-19 yang berusaha menggapai level Inggris. Sebagai contoh, Italia dengan usaha memodernisasi ekonominya, Prancis dengan penerapan tarif besar-besaran, Jerman dan Jepang melalui pemeliharaan manufaktur dalam negeri yang nantinya akan melindungi mereka dari perusahaan asing di negara tersebut (Marios I. Katsioloudes and Spyros Hadjidakis, 1959). Inggris sendiri yang sangat gencar akan kebebasan perdagangan di dunia ini secara

bertahap pada 1930-an mulai meninggalkan perdagangan bebas. Di Amerika Serikat, proteksionisme memuncak dengan Undang-Undang Tarif Smoot-Hawley yang terkenal pada 1930 (Irwin, 2011).

Perdagangan bebas atau liberalisasi perdagangan yang kerap kali dikencangkan oleh para negara kapitalis justru sering dirusak oleh beberapa aktor, seperti dalam kasus ini adalah negara Amerika Serikat. Amerika Serikat yang menjunjung liberalisme dengan liberalisasi perdagangan, nyatanya kerap kali kedapatan melakukan kebijakan proteksionisme ini yang tentu saja lebih menjerok kepada perilaku proteksionis. Hal tersebut makin nampak terlihat ketika Tiongkok menjadi raksasa baru di dalam perdagangan dunia dan mulai menyamai – bahkan mungkin menyaingi – Amerika Serikat (Robert J. Art, 2010). Perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok pun terjadi terjadi hingga saat ini (Nisreen Moosa and others, 2020). Terdapat berbagai kebijakan guna memproteksi AS dari persaingan yang ada dalam liberalisasi perdagangan ini. Salah satunya adalah ketika Presiden ke-45 Amerika Serikat, Donald Trump, mengeluarkan kebijakan mengenai tarif ke banyak negara yang berdagang di AS dengan nilai miliaran dollar, terkhususnya adalah negara Tiongkok. Amerika Serikat melalui Presiden Trump pada bulan Mei 2019 menaikkan tarif menjadi 25% dari 10% pada barang-barang Tiongkok senilai \$200 miliar. (Li, 2019) Presiden Trump juga ingin memotong defisit perdagangan dengan Tiongkok – negara yang sebelumnya dituduh melaksanakan praktik perdagangan tidak adil sejak sebelum dia menjadi presiden (BBC, 2019). Kebijakan ini bertentangan dengan prinsip liberalisasi investasi asing dan dapat membatasi investasi asing di Amerika Serikat.

Selain pemberlakuan tarif, Amerika Serikat memiliki berbagai kebijakan lainnya dalam melanggengkan proteksi perdagangan negara mereka, salah satunya adalah *Entity List*. *Entity List* merupakan daftar hitam atau *black list* kepunyaan AS, di mana perusahaan yang masuk di dalam

daftar tersebut tidak bisa membeli barang dari AS, kecuali atas izin tersendiri dari pemerintah AS (BIS, 2020). Contohnya adalah dimasukkannya Huawei – perusahaan telekomunikasi raksasa asal Tiongkok – dan perusahaan afiliasi di dalamnya ke dalam suatu daftar. Masuknya Huawei ke dalam *Entity List* ini diputuskan oleh Komite Tinjauan Pengguna Akhir yang terdiri dari pejabat dari Departemen Perdagangan, Departemen Pertahanan, Departemen Luar Negeri, dan Departemen Energi. Departemen Perdagangan Amerika Serikat memiliki Biro Industri dan Keamanan (Bureau of Industry and Security/BIS) yang salah satu wewenangnya adalah menerbitkan nama pihak asing tertentu (bisnis, lembaga penelitian, organisasi pemerintah dan swasta, individu, dan badan hukum lainnya) yang tunduk dalam persyaratan lisensi khusus untuk ekspor, re-ekspor, dan/atau transfer (dalam negeri) dari suatu item atau produk tertentu. Nama-nama tersebut terdiri dari *Entity List* yang diatur dalam Supplement No. 4 to Part 744 of the Export Administration Regulations (EAR) (BIS, 2020). Berdasarkan pada EAR, orang atau organisasi yang memiliki alasan masuk akal untuk percaya bahwa mereka terlibat, terlibat, atau menimbulkan risiko signifikan untuk terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan keamanan nasional atau asing terkait kepentingan kebijakan Amerika Serikat, dan mereka yang bertindak atas nama orang tersebut, dapat ditambahkan ke dalam *Entity List*.

Kongres Amerika Serikat pada tanggal 12 Desember 2017 mengesahkan National Defense Authorization Act (NDAA) untuk Tahun Anggaran 2018 (US DOD, 2017). Pasal 1656(a) memerintahkan Menteri Pertahanan untuk memberikan sertifikasi kepada komite otorisasi dan alokasi pertahanan kongres apakah United States Department of Defense (DOD) atau Kementerian Pertahanan Amerika Serikat menggunakan “peralatan atau layanan telekomunikasi pertahanan yang tertutup” dalam komando, kendali, dan komunikasi nuklirnya, pertahanan rudal balistik, dan

kelangsungan sistem pemerintahannya. Kongres menyebut peralatan Huawei sebagai peralatan yang “tercakup” dalam undang-undang tersebut. Pasal 1656(b) melarang Sekretaris untuk mengadakan atau memperoleh, atau memperpanjang atau memperbarui kontrak untuk mengadakan atau memperoleh, peralatan, sistem, atau layanan apa pun yang menggunakan peralatan atau layanan Huawei sebagai komponen penting dari sistem tersebut, yang efektif satu tahun sejak tanggal diberlakukannya.

Namun, bertolak belakang dengan pernyataan sebelumnya, Pejabat Asisten Menteri Pertahanan untuk Pertahanan Dalam Negeri dan Keamanan Global, Thomas Atkin pernah mengatakan, “*There are currently no Huawei or ZTE products on the DOD Unified Capabilities Approved Products List (APL)*” (Congress, 2016) yang berarti tidak ada produk Huawei atau ZTE dalam APL yang disetujui DOD. Kementerian Pertahanan kemudian mengklarifikasi, “*The fact that a product does not appear on an APL does not mean contractors cannot offer bids or that the government can still select outside the APL. Short of suspension and debarment, federal contractors and vendors are not precluded from competing on DOD contracts*” (Congress, 2016) yang berarti fakta bahwa suatu produk tidak muncul di APL tidak berarti kontraktor tidak dapat mengajukan penawaran atau pemerintah masih dapat memilih di luar APL. Selain penangguhan dan pencekalan, kontraktor dan vendor federal tidak dihalangi untuk bersaing dalam kontrak DOD.

Pernyataan yang berlawanan dalam internal pemerintah Amerika Serikat dapat menjadi indikator bahwa Amerika Serikat belum memiliki gambaran yang jelas mengenai penggunaan peralatan Huawei, atau kebijakan yang jelas mengenai penggunaan Huawei di dalam negara mereka. Karena itu, penelitian ini pun dilakukan, guna membahas mengapa Kebijakan Huawei Ban akhirnya dikeluarkan oleh Amerika Serikat.

TINJAUAN PUSTAKA

Artikel pertama yang menjadi literatur rujukan penelitian ini ditulis oleh Ernawati Batubara dalam suatu artikel jurnal tahun 2017 yang berjudul "Kebijakan Proteksionisme Amerika Serikat Terhadap Republik Rakyat Cina". Ernawati dalam tulisannya menyebutkan bahwa hubungan perdagangan antara AS dengan Tiongkok lebih condong memberikan keuntungan terhadap pihak Tiongkok, di mana negara tersebut mendapatkan surplus perdagangan, sedangkan defisit yang berkepanjangan dialami negara AS. Padahal, pada beberapa dekade lalu, Amerika Serikat dan Tiongkok baru menjalin hubungan perdagangan mereka (Batubara, 2017). Tiongkok dinilai mampu oleh Amerika Serikat mendorong perekonomian negara mereka. Salah satu cara yang dilakukan untuk mengurangi hambatan dalam perdagangan internasional mereka adalah dengan memasukkan Tiongkok ke dalam WTO dan membuat Tiongkok sebagai mitra perdagangan internasional terbesar bagi Amerika Serikat. Hegemoni Amerika Serikat akan ekonomi dunia pun harus tersingkir oleh kebangkitan ekonomi Tiongkok walaupun dengan kelemahan-kelemahan yang didapati dari investigasi dalam *Section 301*. Melalui alasan tersebut Amerika Serikat berusaha mengembalikan posisi mereka dalam perekonomian yang telah diduduki Tiongkok dan berdasarkan *Section 301*, Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan tarif baru untuk Tiongkok. Perdagangan internasional yang dulunya terjalin erat antar kedua negara pun berubah menjadi perang dagang dengan dikeluarkannya kebijakan proteksionisme dari Amerika Serikat terhadap Tiongkok.

Ernawati menggunakan teori merkantilisme dan konsep kebijakan proteksionisme, di mana teori merkantilisme digunakan untuk melihat dominasi kepentingan nasional dan peran negara, yaitu Amerika Serikat dalam mengarahkan aktivitas ekonomi mereka dan konsep kebijakan proteksionisme digunakan dalam penelitian untuk melihat penetapan kebijakan AS sebagai bentuk dari tergesernya kekuatan

ekonomi dan perpindahan pekerjaan dari AS ke Tiongkok. Melalui kerangka teori yang digunakan, dapat dilihat perbandingan penelitian yang dikerjakan oleh peneliti dengan Ernawati, di mana peneliti tidak menggunakan teori merkantilisme dan konsep kebijakan proteksionisme, tetapi teori pilihan rasional dan konsep kepentingan nasional. Peneliti pun mengkaji Amerika Serikat yang mengeluarkan kebijakan proteksionisme untuk melindungi negara mereka, dengan melakukan pembatasan terhadap perusahaan telekomunikasi raksasa asal Tiongkok, yaitu Huawei.

Artikel jurnal yang ditulis oleh Min Tang pada tahun 2020 akan menjadi literatur kedua dalam penelitian ini. Tang menulis artikel yang berjudul "*Huawei Versus the United States? The Geopolitics of Exterritorial Internet Infrastructure*". Tang melalui tulisannya menyatakan bahwa tuduhan Amerika Serikat terhadap perusahaan telekomunikasi raksasa asal Tiongkok, Huawei, dapat digunakan sebagai studi kasus yang menyingkap kompleksitas yang berkembang dalam tata kelola internet global. Perselisihan perdagangan bilateral disebutkan bukanlah inti utama dalam kasus yang melibatkan pemerintah Amerika Serikat dengan perusahaan Huawei, tetapi lebih merujuk kepada permasalahan geopolitik tentang infrastruktur internet eksteritorial. Tulisan ini turut menggambarkan sejarah perkembangan dan hadirnya Huawei di Amerika Serikat sehingga dapat menjelaskan cara yang digunakan dan sejauh mana pemerintah Amerika Serikat menggunakan hak mereka dalam mengeluarkan kebijakan terkait perdagangan terhadap perusahaan asal Tiongkok yang membuat teknologi 5G (TANG, 2020). Min Tang mencoba mengaitkan kasus Huawei dengan sengketa historis dalam tatanan komunikasi global dan akan membedah lebih dalam perdebatan tentang tata kelola internet terkait "multistakeholderisme" dan peran negara.

Maka dari itu, peneliti mencoba melihat sengketa atau kasus antara Amerika Serikat dan Huawei yang digambarkan dalam artikel ini dan kembali menuliskan dalam

penelitian ini. Perbedaan yang dapat dilihat dari penelitian ini adalah Tang lebih condong kepada permasalahan geopolitik infrastruktur internet, sedangkan dalam penelitian ini, peneliti akan lebih condong terhadap perspektif perang dagang yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Tiongkok (negara asal perusahaan Huawei). Namun, permasalahan geopolitik infrastruktur internet dapat peneliti kaji lebih lanjut dalam bab pembahasan, yang mungkin akan menjawab pertanyaan penelitian tentang alasan dikeluarkannya kebijakan Huawei Ban oleh Amerika Serikat.

Artikel ketiga yang akan menjadi salah satu literatur bacaan penelitian ini ditulis oleh Giandi Kartasasmita dan Andrea Prisca Kurnadi. Kartasasmita dan Kurnadi pada tahun 2020 yang berjudul "Securitization of Chinese Technology Companies in the United States of America". Proses sekuritisasi oleh pemerintah Amerika Serikat atas perusahaan teknologi Tiongkok merupakan masalah yang hendak dijelaskan dalam tulisan ini. Disebutkan bahwa sebelum pemerintahan Presiden Donald Trump pada tahun 2016, belum ada kebijakan atau tindakan secara intens atas perusahaan teknologi asal negara lainnya dengan keamanan nasional sebagai argumen mereka oleh pemerintah Amerika Serikat - walaupun ancaman keamanan siber sudah disadari oleh Amerika Serikat sejak tahun 1998 (Kartasasmita, 2020). Pemerintah era Presiden Trump dinilai berhasil menjalankan sekuritisasi atas perusahaan teknologi asal Tiongkok yang membuat pandangan ancaman akan keamanan, privasi dan kebebasan di Amerika Serikat berdasarkan penemuan dan membalikkan pandangan ancaman tersebut terhadap Tiongkok berdasarkan temuan oleh Kartasasmita dan Kurnadi. *Securitization Theory* merupakan teori yang digunakan dalam tulisan ini, yang berguna untuk memberikan pandangan baru tentang perdebatan antara dua kelompok; mereka yang mengklaim ancaman adalah objektif, dan mereka yang berpendapat bahwa ancaman keamanan adalah subjektif.

Perbedaan yang dapat dilihat dari tulisan Kartasasmita dan Kurnadi dengan peneliti adalah lingkup aktor yang dibahas, di mana mereka melihat ancaman terhadap Amerika Serikat yang aktor negara berasal dari aktor negara lainnya, yaitu Tiongkok, sedangkan peneliti melihat Amerika Serikat sebagai aktor negara berhadapan dengan Huawei yang merupakan aktor non-state (bukan negara). Peneliti juga akan menelaah lebih lanjut akan keberhasilan sekuritisasi oleh Amerika Serikat yang mungkin menjadi salah satu alasan kebijakan Huawei Ban dikeluarkan.

Artikel keempat merupakan artikel jurnal yang ditulis oleh Walter Block dan Robert W, McGee dari tahun 1997 dengan judul "*Must Protectionism Always Violate Rights?*". Block dan McGee memulai pembahasan dengan pengantar tentang proteksionisme dan perdagangan bebas. Melalui beberapa bacaan yang disitir oleh Block dan McGee, para peneliti atau ilmuwan sosial politik dibagi menjadi dua kubu, yaitu utilitarian dan non-utilitarian. Para utilitarian berpendapat bahwa kebijakan perdagangan bebas memiliki manfaat yang lebih besar dibanding dengan kerugian yang akan didapatkan, maka dari itu kebijakan perdagangan bebas adalah pilihan yang terbaik. Sedangkan para non-utilitarian melihat dari sisi yang dirugikan perdagangan bebas dan mengabaikan keuntungan yang didapatkan, karena itu mereka condong terhadap proteksionisme. Lebih lanjut, banyaknya pihak yang lebih condong terhadap utilitarian tidaklah mengejutkan, para ekonom sendiri sebagian besar adalah utilitarian (Block & McGee, 1997). Masalah lebih lanjut ditemukan dalam utilitarianisme, di mana keuntungan bersama dalam jumlah besar dapat dihasilkan bila minoritas memiliki pemikiran atau penentangan kuat akan kebijakan tertentu tidak dapat melawan mayoritas yang tak berpikiran sama. Maka dari itu, hak menjadi salah satu konsersn utama, di mana kaum utilitarian jarang mempertimbangkan hak dalam menentukan suatu perdagangan atau kebijakan lainnya adalah "baik". Block dan McGee berusaha

membatasi analisis dalam makalah ini pada hubungan antara hak dan perdagangan, terkhususnya proteksionisme. Perbedaan artikel tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah kasus yang diteliti, di mana Block dan McGee menilai kebijakan-kebijakan proteksionis apakah membatasi atau melanggar hak, sedangkan peneliti mencoba meneliti alasan dan apakah kebijakan proteksionisme yang dilakukan Amerika Serikat, yaitu Huawei Ban adalah pilihan yang rasional.

Dari artikel-artikel yang telah dijabarkan di atas dapat menjadi sumber literatur yang baik dan berguna dalam melakukan penelitian ini. Tulisan-tulisan tersebut peneliti nilai memiliki kesamaan. Di mana, dalam tulisan-tulisan tersebut, terdapat pembahasan mengenai perang dagang yang dilakukan Amerika Serikat dengan Tiongkok dan pembahasan mengenai kebijakan-kebijakan Amerika Serikat yang dinilai sebagai suatu tindakan proteksionisme, yaitu keluarnya kebijakan Huawei Ban oleh pemerintah Amerika Serikat. Maka, peneliti akan mengambil poin-poin yang didapat dari literatur atau tulisan-tulisan yang ada dan mengembangkannya sebagai suatu penelitian sendiri.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, di mana temuan-temuan yang diperoleh tidaklah diperoleh berdasarkan dengan cara statistik, berupa angka, atau lainnya semacam tersebut. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang dipakai untuk memahami lebih dalam dari individu ataupun kelompok yang diakui sebagai masalah sosial. Melalui penelitian jenis ini, peneliti hendak menjelaskan secara rinci mengenai suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi di dalam Hubungan Internasional – yaitu alasan dibalik keluarnya Kebijakan Huawei Ban oleh Amerika Serikat – yang akan dilakukan di dalam penelitian kuantitatif. Cara yang dipakai dalam metode ini adalah dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait penelitian, pengumpulan data yang valid dan

spesifik, menganalisis data tersebut secara induktif lalu mengolah datanya sehingga mendapatkan hasil dari penelitian yang dilakukan. Melalui penggunaan teori pilihan rasional dan konsep kepentingan nasional, peneliti akan menjelaskan alasan dibalik keluarnya kebijakan tersebut. Data primer banyak digunakan dari situs resmi pemerintah dan organisasi-organisasi dan data sekunder diambil dari artikel-artikel jurnal serta surat kabar terkait dengan penelitian. Penelitian ini sendiri telah disempitkan dengan rentang waktu dari tahun 2019 hingga 2022.

KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka pemikiran merupakan suatu gambaran berupa teori dan/atau konsep yang dapat dipakai untuk menjelaskan suatu kasus, dan juga hubungan yang ada antara variabel yang satu dengan variabel lainnya sehingga suatu fenomena tersebut terjadi. Untuk menjelaskan mengenai keluarnya kebijakan Huawei Ban oleh Amerika Serikat, maka peneliti menggunakan teori pilihan rasional dan konsep kepentingan nasional untuk membedah permasalahan yang ada dan menjelaskannya.

TEORI PILIHAN RASIONAL

Teori pilihan rasional yang merupakan aliran pemikiran yang didasarkan pada asumsi bahwa suatu aktor memilih suatu keputusan atau tindakan dengan berdasarkan pada preferensi pribadi mereka. Suatu aktor dengan mempertimbangkan manfaat dan timbal-balik atas pilihan yang ada akan mendorong keputusan kebijakan atau tindakan yang paling optimal. Teori pilihan rasional pun digunakan untuk memodelkan pengambilan keputusan manusia, terutama dalam konteks ekonomi mikro, di mana teori ini membantu para ekonom lebih memahami perilaku masyarakat dalam hal tindakan individu seperti yang dijelaskan melalui rasionalitas, di mana pilihan konsisten karena dibuat sesuai dengan preferensi sang aktor yang mengambil keputusan.

Cost and Benefit

terdapat istilah “cost and benefit” atau “biaya dan manfaat” yang menjadi hal yang mendasar untuk membantu aktor atau seseorang dalam mengambil suatu keputusan dengan menimbang baik dan buruknya dari suatu pilihan. Adam Smith mengatakan bahwa suatu individu melakukan analisis dari cost and benefit untuk menentukan suatu pilihan yang paling tepat bagi mereka. Cost atau biaya adalah aspek yang tidak diinginkan terjadi yang terkait dengan pilihan yang ada. Cost meracu pada hal yang harus dikorbankan atau dikeluarkan oleh seseorang atau sang aktor dalam mengambil keputusan. Cost memiliki beberapa jenis, di antaranya; (1) Opportunity Cost, di mana jenis ini yang paling sering didiskusikan dalam teori pilihan rasional, yang meracu pada nilai alternatif terbaik berikutnya yang hilang ketika suatu keputusan diambil. Ini juga berarti pilihan yang dapat diperoleh oleh aktor jika memilih pilihan yang berbeda. (2) Explicit Cost: Biaya eksplisit adalah biaya moneter atau langsung yang terkait dengan suatu keputusan. Misalnya, jika suatu perusahaan memutuskan untuk membeli mesin baru, biaya pembelian mesin tersebut merupakan biaya eksplisit. (3) Implicit Cost: Biaya implisit adalah biaya non-moneter, seringkali terkait dengan peluang, yang terkait dengan suatu keputusan. Misalnya, jika seorang pengusaha memutuskan untuk memulai bisnisnya sendiri daripada mengambil pekerjaan bergaji, biaya implisitnya bisa berupa gaji yang mereka tinggalkan. (4) Sunk Cost: merupakan biaya yang telah terjadi dan tidak dapat diperoleh kembali, apapun keputusan yang diambil saat ini. Dalam pengambilan keputusan yang rasional, biaya hangus tidak boleh mempengaruhi keputusan di masa depan. Benefit atau manfaat berarti hasil atau keuntungan positif yang didapatkan terkait dengan suatu keputusan. Benefit meracu pada apa yang ingin dicapai atau diperoleh aktor lewat tindakan-tindakan atau cara-cara tertentu. Benefit memiliki beberapa jenis, di antaranya; (1) Monetary Benefits: Ini adalah keuntungan atau keuntungan finansial

yang diterima sebagai akibat dari suatu keputusan. Misalnya, jika seorang investor membeli saham dan kemudian menjualnya dengan harga lebih tinggi, keuntungan moneterinya adalah keuntungan yang diperoleh. (2) Non-Monetary Benefits: Manfaat non-moneter adalah imbalan non-finansial yang dapat dihasilkan dari suatu keputusan. Hal ini dapat mencakup kepuasan pribadi, kebahagiaan, peningkatan kesejahteraan, atau keuntungan tak berwujud lainnya (Step Seven, 2023). (3) Short-Term vs. Long-Term Benefits: di mana manfaat dapat dikategorikan berdasarkan jangka waktunya (Boyte-White, 2023). Beberapa keputusan menghasilkan keuntungan jangka pendek, sementara keputusan lainnya mungkin menghasilkan keuntungan jangka panjang. Setelah memahami cost and benefit, maka aktor dapat mempertimbangkan mengenai pengambilan keputusan yang akan dibuatnya. Aktor dalam teori pilihan rasional diasumsikan membuat keputusan rasional dengan membandingkan cost and benefit terkait dengan pilihan yang berbeda. Proses pengambilan keputusan biasanya melibatkan langkah-langkah berikut (Hayes, 2023): 1. Mengidentifikasi pilihan atau alternatif yang tersedia. 2. Memperkirakan biaya dan manfaat yang terkait dengan setiap alternatif. 3. Membandingkan manfaat bersih (manfaat dikurangi biaya) dari masing-masing alternatif. 4. Memilih alternatif yang memaksimalkan keuntungan bersih, seiring dengan upaya para aktor rasional untuk membuat pilihan yang memaksimalkan kesejahteraan atau utilitas mereka secara keseluruhan.

KEPENTINGAN NASIONAL

Kepentingan nasional merupakan tujuan negara dan ambisi negara baik dalam ekonomi, militer ataupun budaya. Sejak berakhirnya era kolonisasi pada 1960 dan perang dingin pada 1989, era baru telah memunculkan kekuasaan aktor non-negara, yaitu manusia secara individu maupun kolektif (komunitas atau institusi swasta) sebagai pemberi legitimasi kebijakan

negara. Konsep National Interest berasal dari pemikiran ilmuwan Hans J. Morgenthau. Ia mendefinisikan kepentingan nasional sebagai kemampuan minimum negara-negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultural dari gangguan negara-negara lain. Dari tinjauan tersebut, para pemimpin suatu negara dapat menurunkan suatu kebijakan spesifik terhadap negara lain bersifat kerjasama maupun konflik. Konsep ini digunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara.

Seperti yang dipaparkan oleh Kindleberger mengenai kepentingan nasional; "...hubungan antara negara tercipta karena adanya perbedaan keunggulan yang dimiliki tiap negara dalam memproduksi. Keunggulan komparatif (comparative advantage) tersebut membuka kesempatan pada spesialisasi yang dipilih tiap negara untuk menunjang pembangunan nasional sesuai kepentingan nasional..."

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa keberagaman tiap-tiap negara yang ada diseluruh dunia memiliki kapasitas yang berbeda. Hal ini karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari demografi, karakter, budaya, bahkan sejarah yang dimiliki negara tersebut. Sehingga negara saat ingin melakukan kerjasama dapat melihat kondisi dari keunggulan-keunggulan yang dapat menjadi pertimbangan. Pelaksanaan kepentingan nasional yang mana dapat berupa kerjasama bilateral maupun multilateral kesemua itu kembali pada kebutuhan negara. Hal ini didukung oleh suatu kebijakan yang sama halnya dengan yang dinyatakan oleh Hans J. Morgenthau bahwa kepentingan nasional merupakan;

"Kemampuan minimum negara-negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultural dari gangguan negara-negara lain. Dari tinjauan itu, para pemimpin suatu negara dapat menurunkan suatu kebijakan spesifik terhadap negara lain bersifat kerjasama maupun konflik."

Amerika Serikat memiliki kebutuhannya sendiri yang harus dipenuhi. Kebutuhan dari bidang ekonomi, pertahanan

& keamanan merupakan bentuk dari kepentingan yang dibutuhkan negara Amerika Serikat. Amerika Serikat yang merupakan negara berdaulat dan adidaya sudah pasti mengusahakan berbagai macam cara untuk melindungi negara tersebut dari ancaman-ancaman yang dapat menimpa mereka.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemberitaan mengenai Huawei vs Amerika Serikat ini lumayan menjadi perhatian media di seluruh dunia. Bagaimana kelanjutan dari perdagangan, pemakaian sistem Huawei, dan upaya proteksionisme AS merupakan hal yang dibicarakan. Terdapat kekhawatiran oleh negara Barat yang dapat diidentifikasi sebagai dasar dari tindakan AS mengeluarkan kebijakan terhadap Huawei.

ALASAN KEBIJAKAN HUAWEI BAN

Perang teknologi super canggih merupakan hal pertama sebagai alasan disinyalir sebagai dibentuknya kebijakan Huawei Ban oleh Amerika Serikat. Di mana 5G merupakan sistem jaringan super cepat dan perusahaan Huawei merupakan salah satu pengembang dari sistem ini. Huawei pun melakukan perundingan dengan banyak negara untuk memakai sistemnya ini di negara mereka. Namun, tentu saja industri yang satu ini tidak akan berjalan dengan mudah begitu saja. Jika produk Huawei digunakan sebagai infrastruktur 5G, para pesaing mengklaim Huawei "bisa membaca pesan yang dikirim melalui jaringan atau bahkan mematikan jaringan, yang tentu akan menyebabkan gangguan serius."

Pemerintah AS terus melakukan desakan agar tidak menggunakan perangkat dari Huawei. Seruan ini terfokus ke kelompok yang biasa disebut "Five Eyes", yang terdiri atas Amerika, Inggris, Kanada, Australia dan Selandia Baru. Kerjasama intelijen dan saling tukar informasi telah sering dilakukan oleh kelima negara tersebut. AS mengungkapkan tidak akan lagi memberikan informasi jikalau sekutunya tetap ingin menggunakan teknologi 5G dari Huawei yang

dinilai dapat meretas keamanan negaranya. Kekhawatiran pemerintah mengakses data perusahaan, antara lain didasarkan pada praktik yang berlaku di AS sendiri. Mantan kontraktor Badan Keamanan AS, Edward Snowden, mengungkapkan bahwa badan-badan intelijen AS meretas data milik perusahaan teknologi termasuk Google dan Yahoo.

Selain itu, terdapat hal lain yang dikhawatirkan, yaitu mengenai "layar anti-pecah". Dugaan pelanggaran peraturan perdagangan senjata internasional dilayangkan kepada Huawei dan diselidiki oleh pihak Federal Bureau of Investigation (FBI). Kasus ini berawal ketika perusahaan Akhan Semiconductor melakukan pembicaraan dengan Huawei untuk memasok layar super kuat, yang dibuat dengan menempelkan lapisan permata artifisial pada layar. Sampel layar ini dikembalikan Huawei beberapa bulan berikutnya dalam keadaan rusak parah. Melalui investigasi FBI lebih lanjut, dikemukakan bahwa peralatan atau perangkat Huawei mampu menangkap dan mengganggu komunikasi Kementerian Pertahanan yang sangat terbatas, termasuk yang digunakan oleh Komando Strategis AS, yang mengawasi senjata nuklir negara tersebut.

Teknologi menjadi pembahasan kedua tentang alasan kebijakan ini dibuat. Teknologi tinggi yang diciptakan oleh sebuah perusahaan dan dimanfaatkan oleh negara lain dapat menjadi bumerang bagi negara itu sendiri. Permasalahan seperti teknologi 5G yang dimiliki Huawei yang sangat canggit dan cepat disinyalir mampu melakukan spionase dan perampasan informasi dari pihak Amerika Serikat. Tidak hanya itu terdapat skandal lainnya yang menguatkan pernyataan mengenai permasalahan keamanan yang mengakibatkan Amerika Serikat mengeluarkan TGL terhadap Huawei.

Perusahaan telekomunikasi T-mobile yang berasal dari Jerman yang sebelumnya bekerjasama dengan Huawei menjadi contoh kasus ini. Seorang pegawai Huawei menyebabkan skandal dengan "tidak sengaja

membawa robot jari di dalam tasnya". Hal tersebut tentu saja membuat geram T-mobile dan tidak mempercayai alasan ketidaksengajaan tersebut dan tetap membawa permasalahan tersebut ke pengadilan. Hal tersebut disinyalir tidak dilakukan oleh satu pihak tetapi didapati dukungan oleh eksekutif senior di Tiongkok, berdasarkan komunikasi email yang ada, Meng Wanzhou yang merupakan direktur keuangan Huawei pun ditangkap di Kanada oleh permintaan AS dengan salah satunya hal yang dijelaskan sebelumnya.

Selanjutnya adalah indikasi mengenai kerjasama yang dilakukan oleh pihak Huawei dengan Iran. Salah satu dakwaan Jaksa AS kepada Huawei menyebut Meng Wanzhou — direktur keuangan dan putri penemu Huawei — dan menuduhnya serta perusahaan menjual teknologi AS ke Iran yang melanggar undang-undang sanksi AS. Ia bisa dihukum penjara maksimal 30 tahun jika diekstradisi dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan di AS.

PENGUJIAN RASIONALITAS PEMBUATAN KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT

Dalam pembentukan suatu keputusan atau kebijakan oleh suatu negara, kebijakan tersebut akan dikatakan rasional jika kebijakan atau keputusan itu sejalan dengan kepentingan nasional yang menjadi tujuan suatu negara tersebut atau benefit yang didapatkan lebih besar daripada cost yang dikeluarkan dalam kebijakan tersebut. Larangan Huawei atau kebijakan Huawei Ban oleh pemerintah AS telah menjadi bahan perdebatan yang serius, dan dampak serta manfaatnya telah menjadi topik diskusi. Walaupun ban atau pembatasan yang dilakukan AS diterapkan dengan alasan keamanan, terdapat implikasi ekonomi dan geopolitik sebagai salah satu alasan dalam kebijakan tersebut. Melihat hal tersebut, peneliti menemukan cost and benefit yang dapat menjadi bahan pengambilan keputusan hingga kebijakan Huawei Ban dikeluarkan AS.

No	Kebijakan Huawei Ban Diberlakukan			
	Cost	Jenis	Benefit	Jenis
1.	Ketegangan Perdagangan	Opportunity Cost	Keamanan Nasional Terjaga	Long-Term Benefit
2.	Gangguan Rantai Pasokan	Opportunity Cost	Perlindungan Infrastruktur Vital	Long-Term Benefit
3.	Ketegangan Geopolitik	Opportunity Cost	Membangun Aliansi	Long-Term Benefit
4.			Menyeimbangkan Pasar	Long-Term Benefit
5.			Promosi Teknologi Dalam Negeri	Long-Term Benefit
6.			Unjuk Kekuasaan	Long-Term Benefit

Tabel 1. *Cost and Benefit* Kebijakan Huawei Ban Diberlakukan

No	Kebijakan Huawei Ban Tidak Diberlakukan			
	COST	JENIS	Benefit	Jenis
1.	Ancaman Keamanan	Opportunity Cost	Inovasi dan Persaingan	Long-Term Benefit
2.	Pencurian Kekayaan Intelektual	Opportunity Cost	Keterjangkauan Konsumen	Long-Term Benefit
3.	Ketergantungan Terhadap Teknologi Asing	Opportunity Cost	Hubungan Geopolitik	Long-Term Benefit
4.	Gangguan Pasar	Opportunity Cost		
5.	Ketidakeimbangan Perdagangan	Opportunity Cost		

Tabel 2. *Cost and Benefit* Kebijakan Huawei Ban Tidak Diberlakukan

Melalui penguraian cost and benefit dari Kebijakan Huawei Ban diberlakukan dan kebijakan Huawei Ban tidak diberlakukan, maka peneliti dapat mengaplikasikan komparasi jumlah yang ada ke dalam suatu tabel berikut:

Kebijakan Huawei Ban	Jumlah		C ... B (">"Atau "<")
	Cost	Benefit	
Diberlakukan	3	6	< (Lebih Kecil)
Tidak diberlakukan	5	3	> (Lebih Besar)

Tabel 3. Komparasi Jumlah *Cost and Benefit* dari Kebijakan Huawei Ban Diberlakukan dan Kebijakan Huawei Ban Tidak Diberlakukan

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Melalui konsep kepentingan nasional dan teori pilihan rasional, kebijakan Huawei Ban oleh AS dapat diteliti. Konsep kepentingan nasional melihat Kebijakan Huawei Ban mendukung kepentingan Amerika Serikat yang ingin menjaga negara mereka dari ancaman yang dalam kasus ini adalah perusahaan Huawei. Teori pilihan rasional menjelaskan mengenai suatu keputusan atau tindakan dengan berdasarkan pada preferensi pribadi aktor atau pengambil keputusan. Suatu aktor, yakni Amerika Serikat mempertimbangkan manfaat dan timbal-balik atas pilihan yang ada akan mendorong keputusan kebijakan atau tindakan yang paling optimal. Teori pilihan rasional mengadopsi istilah "cost and benefit" atau "biaya dan manfaat" yang untuk memilih atau memutuskan sesuatu. Cost and benefit menjadi hal yang mendasar untuk membantu aktor atau seseorang dalam mengambil suatu keputusan dengan menimbang baik dan buruknya dari suatu pilihan.

Jadi untuk memandang kebijakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Huawei untuk memproteksi diri mereka tentu saja tepat. Peneliti

mendapatkan hal-hal yang dipertimbangkan AS melalui kebijakan Huawei Ban. Benefit yang akan didapatkan oleh Amerika Serikat adalah lebih besar dibandingkan dengan cost yang akan dikeluarkan negara tersebut dengan adanya kebijakan Huawei Ban. Sedangkan, jika Amerika Serikat menarik atau tidak menerapkan kebijakan Huawei Ban, benefit yang akan didapatkan lebih rendah daripada cost yang akan dikeluarkan. Maka, kebijakan Huawei Ban oleh Amerika Serikat dinilai sebagai suatu pengambilan keputusan yang rasional. AS berusaha menjaga negara mereka, walaupun kebijakan Huawei Ban bertentangan dengan situasi liberalisasi perdagangan di dunia internasional dan TRIMs yang merupakan perjanjian mengenai investasi yang telah disepakati banyak negara, termasuk AS sendiri. Hal ini bertujuan agar negara tidak akan runtuh dan gampang ditumbangkan oleh beberapa alasan pembuatan kebijakan yang telah dijelaskan dapat mengancam Amerika Serikat.

DAFTAR PUSTAKA

- Art, R. J. (2010). The United States and the Rise of China: Implications for the Long Haul. *Political Science Quarterly*, 125(3), 359–391. <http://www.jstor.org/stable/25767046>
- Aswicahyono, H., Fauri, A., Friawan, D., Setiati, I., Ngadiman, J. S., Mangungsong, C., & Damuri, Y. R. (2022). *Economic Impacts of Local Content Requirements in Indonesia*. 1–62. <https://www.csis.or.id/publication/economic-impacts-of-local-content-requirements-in-indonesia/>
- BANTON, C. (2021). *Trade Liberalization: Definition, How It Works, and Example*. Investopedia. <https://www.investopedia.com/terms/t/trade-liberalization.asp>
- Batubara, E. (2017). Kebijakan Proteksionisme Amerika Serikat Terhadap Republik Rakyat Cina. *Jurusan Ilmu Hubungan Internasional*, 110(9), 1689–1699.
- Bayhaqi, B. A., & Mann, H. (2019). *APEC Policy Support Unit Policy Brief No. 28 October 2019 ISDS as an Instrument for Investment Promotion and Facilitation*. 28. https://www.apec.org/docs/default-source/Publications/2019/11/ISDS-as-an-Instrument-for-Investment-Promotion-and-Facilitation/PSU-Policy-Brief_ISDS_Final-rev2.pdf
- BIS. (2020). *What is the Entity List?* Bureau of Industry and Security U.S Department of Commerce. <https://www.bis.doc.gov/index.php/cbc-faqs/faq/281-1-what-is-the-entity-list>
- Block, W., & McGee, R. W. (1997). Must protectionism always violate rights? *International Journal of Social Economics*, 24(4), 393–407. <https://doi.org/10.1108/03068299710162231>
- Bloomberg. (2020). *US violated international trade rules with tariffs on China, says WTO*. https://business-standard.com/article/international/us-violated-international-trade-rules-with-tariffs-on-china-says-wto-120091600114_1.html
- Boyte-White, C. (2023). *Long-Term vs. Short-Term Capital Gains*. Investopedia. <https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/101515/comparing-longterm-vs-shortterm-capital-gain-tax-rates.asp>
- Cappariello, R., Gunnella, V., & Franco-bedoya, S. (2009). Working Paper Series. *Accounting & Finance*, 24(1), 16–33. <https://doi.org/10.1111/j.1467-629x.1984.tb00054.x>
- Cleartax. (2023). *Investment*. <https://cleartax.in/g/terms/investment>
- Congress, U. S. (2016). *House Hearing, 114th Congress - [H.A.S.C. No. 114-128] MILITARY CYBER OPERATIONS*.
- DOD. (2017). *H.R.2810 - National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2018*. United States Department of Defens. <https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/2810?q=%7B%22search%22%3A%5B%22national+defense+authorization+act+fiscal+year+2018%22%5D%7D&s=3&r=13>
- Eckes, A. E. (1995). *Opening America's Market: U.S. Foreign Trade Policy Since 1776*. University of North Carolina Press.
- Greenaway, D., Leybourne, S., & Sapsford, D. (2007). Modeling Growth (and Liberalization) Using Smooth Transitions Analysis. *Economic Inquiry*, 35(4), 798–804.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1465-7295.1997.tb01965.x>
- Hayes, A. (2023). *What Is Cost-Benefit Analysis, How Is it Used, What Are its Pros and Cons?* Investopedia. <https://www.investopedia.com/terms/c/cost-benefitanalysis.asp>
- Investopedia. (2022). *Protectionism: Examples and Types of Trade Protections.* Investopedia. <https://www.investopedia.com/terms/p/protectionism.asp>
- Irwin, D. A. (2011). *Peddling Protectionism: Smoot-Hawley and the Great Depression.* Princeton University Press.
- Kartasmita, G. (2020). The Securitization of China's Technology Companies in the United States of America. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 16(2), 159–178. <https://doi.org/10.26593/jihi.v16i2.4204.159-178>
- Katsioloudes, M. I., & Hadjidakis, S. (1959). International Business: A Global Perspective. In *Nucl. Phys.* (Vol. 13, Issue 1).
- Li, Y. (2019). *Trump says US will impose 10% tariffs on another \$300 billion of Chinese goods starting Sept. 1.* CNBC. <https://www.cnbc.com/2019/08/01/trump-says-us-will-impose-10percent-tariffs-on-300-billion-of-chinese-goods-starting-september-1.html>
- MCDONALD, B. (2012). *INTERNATIONAL TRADE: COMMERCE AMONG NATIONS.* IMF. <https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/Series/Back-to-Basics/Trade>
- Moosa, N., Ramiah, V., Pham, H., & Watson, A. (n.d.). The Origin Of The US-China Trade War. *Applied Economics*, 52(35), 3842–3857. <https://doi.org/10.1080/00036846.2020.1722797>
- OECD. (2008). *OECD Codes of Liberalisation: User's Guide. OECD Codes of Liberalisation of Capital Movements and of Current Invisible Operations*, 12. <http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/38072327.pdf>
- OECD. (2020). Improving the Legal Environment for Business and Investment in Central Asia. *GLOBAL RELATIONS Eurasia Competitiveness Programme*, 4, 4. <https://www.oecd.org/eurasia/Improving>
- LEB-CA-ENG 20 April.pdf
- Overview: *the TRIPS Agreement.* (n.d.). World Trade Organization. Retrieved March 10, 2023, from https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel2_e.htm
- Sidang Komite TRIMs WTO. (2019). Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral - Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi. <https://migas.esdm.go.id/post/read/sidang-komite-trims-wto>
- Significance of Rise in Protectionism. (1977). *May* 1976, 53–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.5089/9781451976632.054>
- Sood, M. (2018). *Hukum Perdagangan Internasional* (2nd ed.). Rajawali Pers.
- Srinivasan, T. N., & Bhagwati, J. (2001). Outward-Oriented and Development: Are Revisionists Right? In *Trade, Development and Political Economy* (Issue 806). https://doi.org/10.1057/9780230523685_1
- Step Seven: *Weigh Up Non-Monetary Costs and Benefits.* (n.d.). Department of Finance UK. Retrieved June 26, 2023, from <https://www.finance-ni.gov.uk/articles/step-seven-weigh-non-monetary-costs-and-benefits>
- Sumadji. (2006). *Kamus Ekonomi.* Wacana Intelektual.
- TANG, M. (2020). Huawei Versus the United States? The Geopolitics of Exterritorial Internet Infrastructure. *International Journal of Communication*, 14, 4556–4577.
- Trade Related Aspects of IP Rights.* (n.d.). The United States Patent and Trademark Office (USPTO). Retrieved March 10, 2023, from <https://www.uspto.gov/ip-policy/patent-policy/trade-related-aspects-ip-rights>
- Trade wars, Trump Tariffs and Protectionism Explained. (2019, May 10). *BBC News.* <https://www.bbc.com/news/world-43512098>
- World Trade Organization (WTO). (2014). Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. https://kemlu.go.id/portal/id/read/133/halaman_list_lainnya/world-trade-organization-wto
- WTO. (2022). *Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs).* https://www.wto.org/english/tratop_e/inv

est_e/trims_e.htm